



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CILEGON
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAMAN MAULUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **256755**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **624.040.000**

1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 247.840.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 176.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **454.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER/2.4 G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **560.272.100****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **1.638.312.100****III. HUTANG** Rp. **300.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.338.312.100**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.